

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 2

BUMD Belum Beri Kontribusi PAD

SEMARANG-Pemprov Jateng terus berupaya melakukan intensifikasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor luar pajak. Pasalnya, dari postur PAD beberapa tahun terakhir, dominasi pajak terlebih dari kendaraan bermotor sangat besar, hampir sekitar 70 persen. Karena itu, DPRD Jateng menyoroti keberadaan BUMD milik Pemprov Jateng yang masih belum bisa memberikan kontribusi.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, M Rodhi menilai keberadaan BUMD di Jateng tidak memberikan kontribusi besar. Padahal, setiap tahun mendapatkan suntikan modal. Harus ada upaya untuk menggenjok sektor non-

pajak.

"Selama ini Pemprov Jateng terlalu menggantungkan dari pajak kendaraan bermotor. Dengan pajak bermotor semakin digencarkan, maka masyarakat akan berlomba-lomba membeli kendaraan bermotor. Otomatis, pemerintah akan kesulitan dalam penataan infrastruktur jalannya," katanya.

Kepala Biro Perekonomian Setda Jateng Budiyanto EP mengakui sektor pajak terutama dari kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar. Namun, pemerintah sudah memiliki perencanaan untuk mengoptimalkan sektor lain dalam hal ini pariwisata. Pemprov berusaha keras untuk mengegolkan



MIPTAHUL ALA/JAWA POS RADAR SEMARANG

M Rodhi

upaya pendirian Jateng Park di Kabupaten Semarang. Peluang pengembangan kawasan Borobudur sebagai kawasan strategis pariwisata nasional akan diambil. Bahkan pendirian PT Garam di Pati pun ditargetkan harus jadi pada 2019 yang mem-

bidik pembuatan garam untuk industri. "Optimalisasi PT PRPP dan kawasan di Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang akan digarap secara optimal," tambahnya.

Sedangkan dosen Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Hadiwinoto menyatakan perlu adanya terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk mendongkrak pendapatannya dari luar pajak. Misalnya Pemprov bisa lebih mengoptimalkan BUMD supaya pengelolaannya lebih profit.

Ia mengakui nilai pajak kendaraan bermotor cukup menggiurkan untuk sebuah pendapatan. Namun kebijakan itu kerap blunder, mengingat peng-

eluaran anggaran tiap tahun khususnya untuk infrastruktur jalan cukup tinggi. "Sektor pajak yang menyumbang 60-80 persen untuk pendapatan, ternyata 80 persennya dari pajak kendaraan bermotor. Dari nilai pendapatan tentu menggiurkan, namun dari sisi tata kelola keuangan daerah bagi saya itu tidak sehat karena masih terfokus pada satu sektor," ucap dia.

Hadiwinoto melihat BUMD yang profit dengan memberikan deviden tinggi, setiap tahunnya masih dipegang PT Bank Jateng, BKK/BPR dan SPJT. "Lantas bagaimana kinerja BUMD lainnya. Ini menjadi PR bagi pemerintahan Ganjar-Yasin," katanya. **(fth/ida)**